

**ANALISIS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN
ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA SINGARAJA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH

KOMANG MAWAR KESUGA DEWI

NIM. 1915613072

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2022

**ANALISIS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN
ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA SINGARAJA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH

KOMANG MAWAR KESUGA DEWI

NIM. 1915613072

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komang Mawar Kesuga Dewi

NIM : 1915613072

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Analisis Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau
Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama
Singaraja

Pembimbing : 1. I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP
2. Drs. I Dewa Made Mahayana, M.Si.

Tanggal Ujian :

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul seperti yang tertulis di atas adalah karya orisinal dan bukan hasil kegiatan plagiat, kecuali yang secara tertulis diacuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 01 Agustus 2022



Komang Mawar Kesuga Dewi

**ANALISIS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN
ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA SINGARAJA**

NAMA Komang Mawar Kesuga Dewi
NIM 1915613072

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP
NIP. 196509011990031001

Drs. I Dewa Made Mahayana, M.Si.
NIP. 196012311990031018

Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua



I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA SINGARAJA

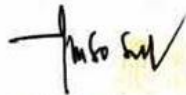
Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:
Tanggal 08 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI
KETUA :



1. I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP
NIP. 196509011990031001

ANGGOTA :



2. Ni Ketut Sukasih, SE., MM
NIP.196602261993032001



3. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum
NIP.196212191993031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat rahmat dan tuntunan-Nya dapat terselaikan. Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Singaraja” tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Pendidikan Diploma III pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah banyak memberikan bimbingan dan sumbangan informasi serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini diucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dan penyusunan tugas akhir di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.
3. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang selalu memberikan dukungan semangat, arahan, dan nasihat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir.

4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
 5. Bapak I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan serta saran dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.
 6. Bapak Drs. I Dewa Made Mahayana, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan pengarahan, bimbingan terkait tata penulisan yang baik dan benar serta saran dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
 7. Pimpinan dan seluruh staff pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja yang telah banyak membantu dan memberikan kesempatan penulis untuk menggali informasi serta data yang penulis butuhkan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
 8. Keluarga Cemara dan teman-teman tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta perhatian dalam menyelesaikan tugas akhir ini
- Menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari sempurna, baik mengenai materi maupun teknik penulisan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Dengan demikian tugas akhir ini

diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Badung, 01 Agustus 2022



Komang Mawar Kesuga Dewi



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ANALISIS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA SINGARAJA

ABSTRAK

Komang Mawar Kesuga Dewi

Peran penting masyarakat dibidang perpajakan mendorong wajib pajak untuk lebih paham dan patuh terhadap kewajibannya. Wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar serta melaporkan pajak terutangya sendiri yang disebut dengan self assessment system. Kelemahan sistem ini adalah peluang wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sangat besar. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap wajib pajak perlu dilakukan salah satunya dengan menerbitkan SP2DK. Penerbitan SP2DK terjadi ketika adanya dugaan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio kontribusi serta efektivitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerbitan SP2DK pada KPP Pratama Singaraja tahun 2019 hingga 2021 memiliki kontribusi sangat kurang. Mengartikan bahwa penerimaan pajak diluar SP2DK besar berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak yang baik. Penerbitan SP2DK pada tahun 2019 cukup efektif, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang tidak kooperatif dan responsif.

Kata Kunci : penerbitan SP2DK, efektivitas, kontribusi, penerimaan pajak

**ANALYSIS ISSUANCE OF REQUESTING EXPLANATION OF DATA AND/
OR INFORMATION (SP2DK) REGARDING TAX REVENUE AT KPP
PRATAMA**

ABSTRACT

Komang Mawar Kesuga Dewi

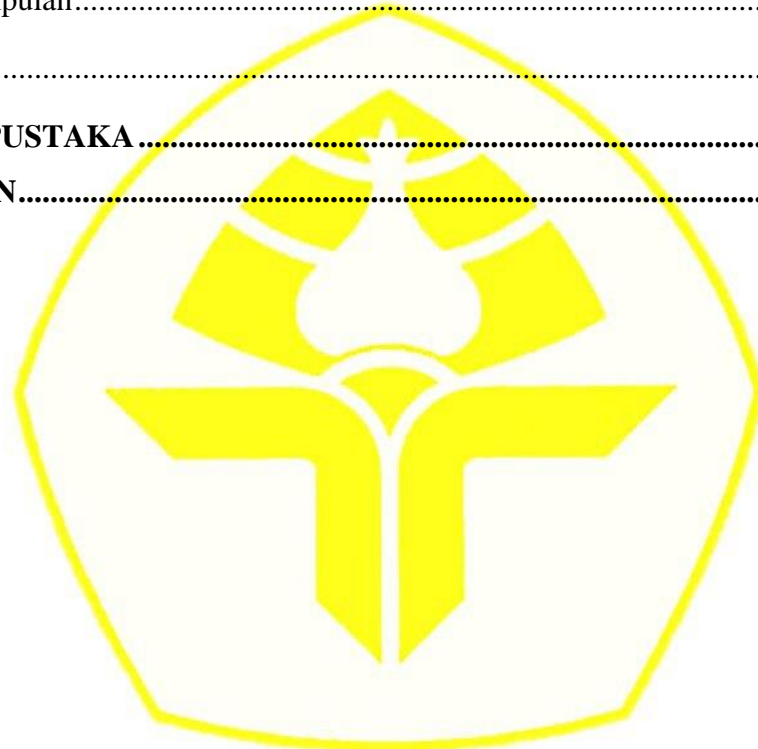
The important role of society in taxation encourages taxpayers to better understand and comply with their obligations. Taxpayers are empowered to calculate, pay and report their tax obligations in a way called a self-assessment system. The weakness of this system is the opportunity for taxpayers not to fulfill their tax obligations is very large. Therefore, taxpayer monitoring needs to be done, which one is the output of SP2DK. SP2DK is issued when there are allegations of taxpayers who have not complied their tax obligations under applicable law. This research method uses a quantitative descriptive method which analysis by calculating contribution and effectiveness. The data collection techniques used are documentation and interviews. The results of the analysis show that SP2DK emissions in the KPP Pratama Singaraja from 2019 to 2021 gave a very less contribution. It is means that non-SP2DK tax revenues are directly proportional to the level of good tax compliance. Issuing the SP2DK in 2019 was effective enough, but not in 2020 and 2021. This is due to the taxpayers being unsupportive and unresponsive.

Keyword : issuance of SP2DK, effectiveness, contribution, tax revenue

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR RUMUS	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Kajian Peneliti Terdahulu.....	8
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	10
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	26
3.2 Jenis Data	27
3.3 Sumber Data	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	34
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	36
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	42
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	49



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	31
Tabel 3. 2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas.....	32
Tabel 4. 1 Penerbitan dan Realisasi SP2DK KPP Pratama Singaraja Tahun.....	35
Tabel 4. 2 Potensi Awal SP2DK Pada KPP Pratama Singaraja Tahun 2019-2021 ...	36
Tabel 4. 3 Kontribusi Penerbitan SP2DK Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Singaraja Tahun 2019-2021	38
Tabel 4. 4 Efektivitas Penerbitan SP2DK Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Singaraja Tahun 2019-2021	39



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

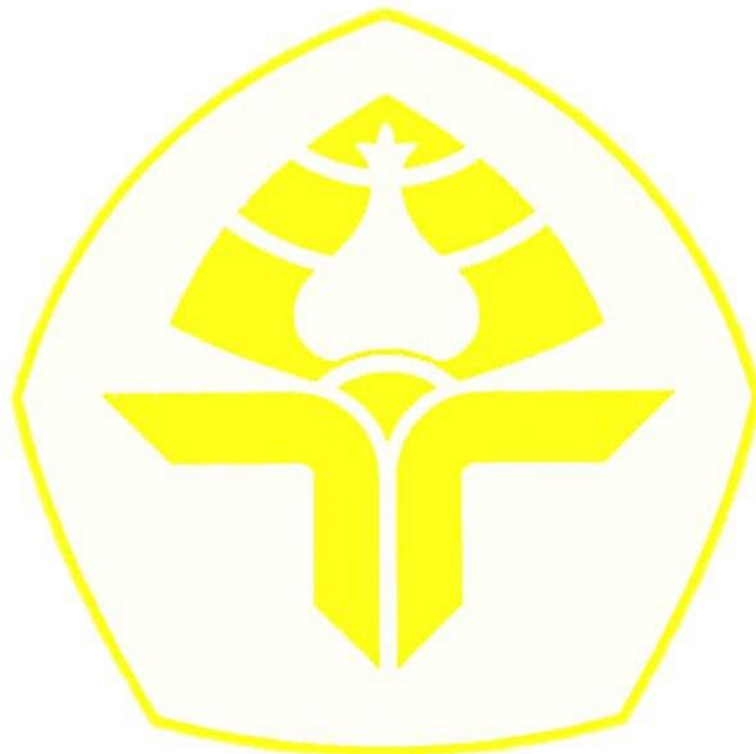
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir..... 25



DAFTAR RUMUS

3.1 Rumus Perhitungan Kontribusi Penerbitan SP2DK	31
3.2 Rumus Perhitungan Efektivitas Penerbitan SP2DK	32



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sekunder Terkait SP2DK Tahun 2019 Hingga 2021	50
Lampiran 2 Potensi Awal SP2DK Tahun 2019 Hingga 2021 Pada KPP Pratama Singaraja.....	51
Lampiran 3 Perhitungan Kontribusi Penerbitan SP2DK Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Singaraja Tahun 2019-2021	52
Lampiran 4 Perhitungan Efektivitas Penerbitan SP2DK Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Singaraja Tahun 2019-2021	53
Lampiran 5 Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015	54
Lampiran 6 Transkrip Wawancara dengan Account Representative pada KPP Pratama Singaraja.....	58



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki tujuan salah satunya untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa sejahtera serta membawa perubahan negara menjadi lebih maju lagi. Tercapainya tujuan tersebut memerlukan biaya yang besar, sehingga pajak adalah salah satu dari beberapa sumber penerimaan yang memiliki peran besar membantu tercapainya rencana serta tujuan negara. Pajak adalah pemungutan wajib yang dilakukan oleh negara kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung yang pada akhirnya penerimaan atas pajak ini akan digunakan untuk pembangunan negara.

Sumber penerimaan negara menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan yang bersumber dari pajak dan selain pajak. Penerimaan negara selain pajak terdiri dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan sumber daya alam, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Tarif masing-masing jenis pajak telah ditentukan oleh undang – undang perpajakan yang berlaku.

Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang cukup potensial, sekitar 80% lebih APBN berasal dari penerimaan pajak. Menurut Prof. Dr. Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki bagian penting dalam tata kelola negara, khususnya membiayai pengeluaran rumah tangga negara yaitu pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas, pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan dalam hal ini menyangkut fungsi *budgetair* atau fungsi anggaran. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu, fungsi anggaran (*budgetair*) dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah. Fungsi inilah yang membantu kemajuan pembangunan negara. Fungsi kedua yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak yang dikenakan untuk rokok dan minuman keras. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengurangi mengonsumsi rokok dan minuman keras tersebut.

Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan terbukti dibulan April tahun 2021 capaian dalam penerimaan pajak hanya 30,94% dari target penerimaan pajak hal ini menandakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih rendah. Langkah sederhana yang dapat dilakukan Wajib Pajak yaitu dengan menyadari bahwa pajak

adalah sumber utama pendapatan negara dan memahami fungsi pajak untuk negara. Setiap Wajib Pajak harus berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan negara.

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu, *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding system*. Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang kepada KPP. Sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system* mengharuskan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan besarnya pajak terutang secara mandiri sehingga pengetahuan mengenai teknis perhitungan yang benar dan pelaporan sangat perlu dipahami wajib pajak.

Kelemahan *self assessment system* adalah sistem ini memungkinkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya baik karena lalai, kesengajaan ataupun karena kurangnya pemahaman wajib pajak itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah tetap dianggap perlu melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan kejujuran Wajib Pajak serta sebagai upaya dalam optimalisasi penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak pemerintah mengeluarkan langkah resmi untuk memeriksa tuntas data serta kewajiban yang seharusnya dari wajib pajak melalui SP2DK kepada wajib pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan. Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Surat SP2DK disampaikan dengan cara dikirimkan kepada wajib pajak maupun disampaikan langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan/*visit*. Bila dimaknai maksud dari penerbitan SP2DK ini merupakan mekanisme *check and recheck* serta pengawasan dalam *self assesment system* perpajakan di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan *review* dan klarifikasi terhadap kewajiban perpajakannya.

Aktivitas pengawasan dengan cara ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak melalui *Account Representative (AR)*. Seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh AR baik data internal dari pelaporan SPT wajib pajak, juga data eksternal dari berbagai pihak seperti bank, perusahaan *leasing*, pemerintah daerah, dan selanjutnya dilakukan analisis potensi pajaknya apabila data yang diterima Kantor Pelayanan Pajak tidak sesuai dengan data yang telah dilaporkan wajib pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SP2DK untuk mempertanyakan kepada wajib pajak terkait data yang diterima. Pada sumber data Approweb Laporan Tahunan Ditjen Pajak (DJP) untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja disebutkan bahwa penerbitan SP2DK pada tahun 2019 sebanyak 11.569

wajib pajak adapun realisasi penerimaan pajak dari SP2DK yang terbit ditahun 2019 mencapai Rp27.758.706.709. Di tahun 2020 sebanyak 6.442 SP2DK diterbitkan dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp19.585.665.780 sedangkan ditahun 2021 jumlah SP2DK yang diterbitkan mengalami kenaikan yaitu menjadi 7.398 dengan realisasi penerimaan pajak dari penerbitan SP2DK tersebut sebanyak Rp11.087.735.805 hal ini akan berdampak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak dan hasil penelitian akan dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk tugas akhir dengan judul **“Analisis Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Singaraja”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimanakah kontribusi penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja?
- 1.2.2 Bagaimanakah efektivitas penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yang diharapkan dapat dicapai adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui kontribusi penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja
- 1.3.2 Untuk mengetahui efektivitas penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan pengalaman langsung dibidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.

1.4.2 Manfaat Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai panduan atau sumber referensi kepustakaan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada objek atau permasalahan yang sama yaitu, analisis

penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang perpajakan.

1.4.3 Manfaat Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja untuk melakukan perbaikan serta peningkatan pengawasan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kontribusi serta efektivitas penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Singaraja yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Penerbitan SP2DK dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, penerbitan ini dapat berpengaruh tentunya pada peningkatan penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja adalah kantor pelayanan pajak yang dalam fungsi pengawasan memiliki wewenang untuk menerbitkan SP2DK. Kontribusi penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Singaraja berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang. Kategori sangat kurang dalam hal ini mengacu pada nominal penerimaan atau sumbangan yang diberikan kecil dan tidak mengartikan bahwa penerbitan SP2DK ini bermasalah karena porsi penerimaan dari SP2DK yang kecil menyebabkan tingkat kontribusinya juga kecil. Tingkat kontribusi penerbitan SP2DK yang kecil dapat mengartikan bahwa penerimaan pajak diluar SP2DK memiliki

porsi yang besar sehingga hal ini menandakan kepatuhan dari wajib pajak baik.

5.1.2 Efektivitas penerbitan SP2DK Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Pada tahun 2019 efektivitas penerbitan SP2DK masuk dalam kriteria cukup efektif. Namun, pada tahun-tahun berikutnya efektivitas penerbitan SP2DK mengalami penurunan dan masuk dalam kriteria tidak efektif. Banyak kendala yang ditemui AR ketika berkomunikasi dengan wajib pajak seperti, wajib pajak yang tidak kooperatif, pengetahuan wajib pajak yang kurang, daya bayar wajib pajak pada tahun tersebut rendah akibat dari tidak stabilnya kegiatan perekonomian hingga alamat wajib pajak yang tidak ditemukan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat bermanfaat dalam hal optimalisasi penerimaan pajak dengan penerbitan SP2DK kepada KPP Pratama Singaraja sebagai berikut.

5.2.1 Menghimbau seluruh wajib pajak untuk melakukan pembaharuan data dalam hal ini alamat tempat tinggal bila wajib pajak berpindah tempat tinggal agar wajib pajak memiliki alamat yang jelas.

5.2.2 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak mengenai maksud dan tujuan dari diterbitkannya SP2DK agar wajib pajak lebih peduli dan patuh serta menganggap penting himbauan-himbauan yang diterima dan memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

5.2.3 Diharapkan kepada instansi terkait bekerja sama dengan baik, sehingga pengawasan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagai upaya meminimalisir adanya wajib pajak yang masih melanggar.

5.2.4 Perlunya sanksi yang tegas untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan data atau keterangan dan tidak bersifat kooperatif ketika pemeriksaan berlangsung.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, H. (2019). APBN dan APBD. *Pustekom Kemdikbud*.
[https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/APBN dan APBD-BB/index.html](https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/APBN%20dan%20APBD-BB/index.html)
- Ahyar, H. dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. (Issue March).
- Beni Peki. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Buku 1*. Taushia.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=985868>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak*.
- Kasmawati, M. (2018). *Fakultas ekonomi universitas satya negara indonesia 2018*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.); Edisi Terb). C.V Andi.
- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 12–18. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.365>
- Parmono, F. V., Sam, U., & Manado, R. (2016). *Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (Sp2Dk)*

Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado. 4(1), 934–944.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.

Soekanto, S. (2020). *Sosiologi Adalah Pengantar*. Coki Siadari.

<https://www.kumpulanpengertian.com/2020/02/pengertian-kontribusi-menurut-para-ahli.html>

Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

ALFABETA,CV.

Sumantri, S. (2018). *Analisis efektivitas surat permintaan penjelasan data atau keterangan (sp2dk) pada penerimaan pajak di kpp pratama lubuk pakam skripsi*.

UU RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*,

1–11. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf

Waluyo. (2008). *Akuntansi Pajak* (Cetakan 1). Penerbit Salemba Empat.

https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Pajak_ed_1/IiJhrbt3O4AC?hl=id&gbpv=1&dq=buku+perpajakan+waluyo&printsec=frontcover

POLITEKNIK NEGERI BALI